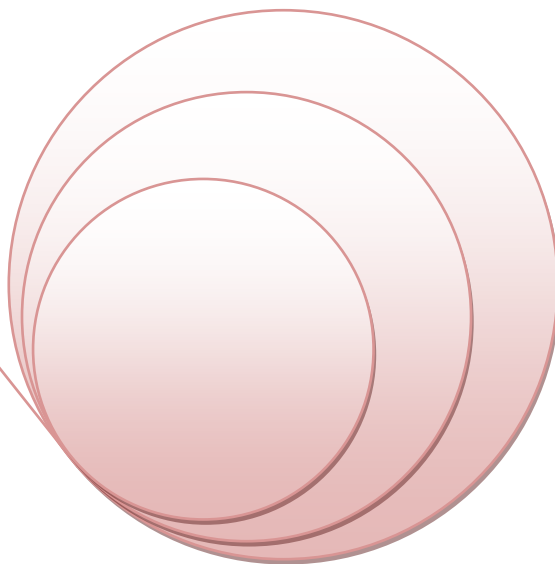
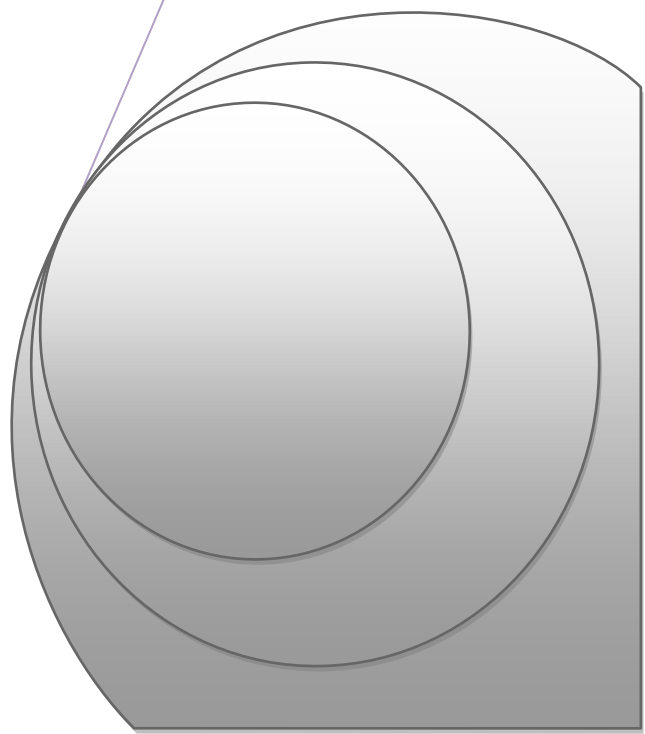




# RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH

**KABUPATEN LUWU TIMUR**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : [bpbdkabluwutimur@gmail.com](mailto:bpbdkabluwutimur@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 21.a TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
- KESATU : Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 21 Juli 2022

**KEPALA PELAKSANA,**  
  
**Drs. MUH. ZABUR**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660930 198603 1 004

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunannya.

Malili, 21 Juli 2022

 **KEPALA PELAKSANA,**  
**Drs. MUH. ZABUR**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660930 198603 1 004

## DAFTAR ISI

|                                                                                                            | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                       | i       |
| DAFTAR ISI .....                                                                                           | ii      |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                         | iii     |
| <br>BAB I      PENDAHULUAN .....                                                                           | <br>1   |
| 1.1    Latar Belakang .....                                                                                | 1       |
| 1.2    Landasan Hukum .....                                                                                | 5       |
| 1.3    Maksud dan Tujuan.....                                                                              | 10      |
| 1.4    Sistematika Penulisan.....                                                                          | 11      |
| <br>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....                                       | <br>12  |
| 2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan<br>Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | <br>12  |
| 2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                    | 24      |
| 2.3    Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat<br>Daerah.....                           | <br>84  |
| 2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....                                                            | 87      |
| 2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                              | 97      |
| <br>BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....                                           | <br>99  |
| <br>BAB IV    PENUTUP .....                                                                                | <br>103 |

## DAFTAR TABEL

- Tabel TC.29 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
- Tabel TC.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel TC.31 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- Tabel TC.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
- Tabel TC.33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Renja BPBD Tahun 2021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten khususnya Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan pengelolaan bencana tersebut diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran yang optimal. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

1. Program dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

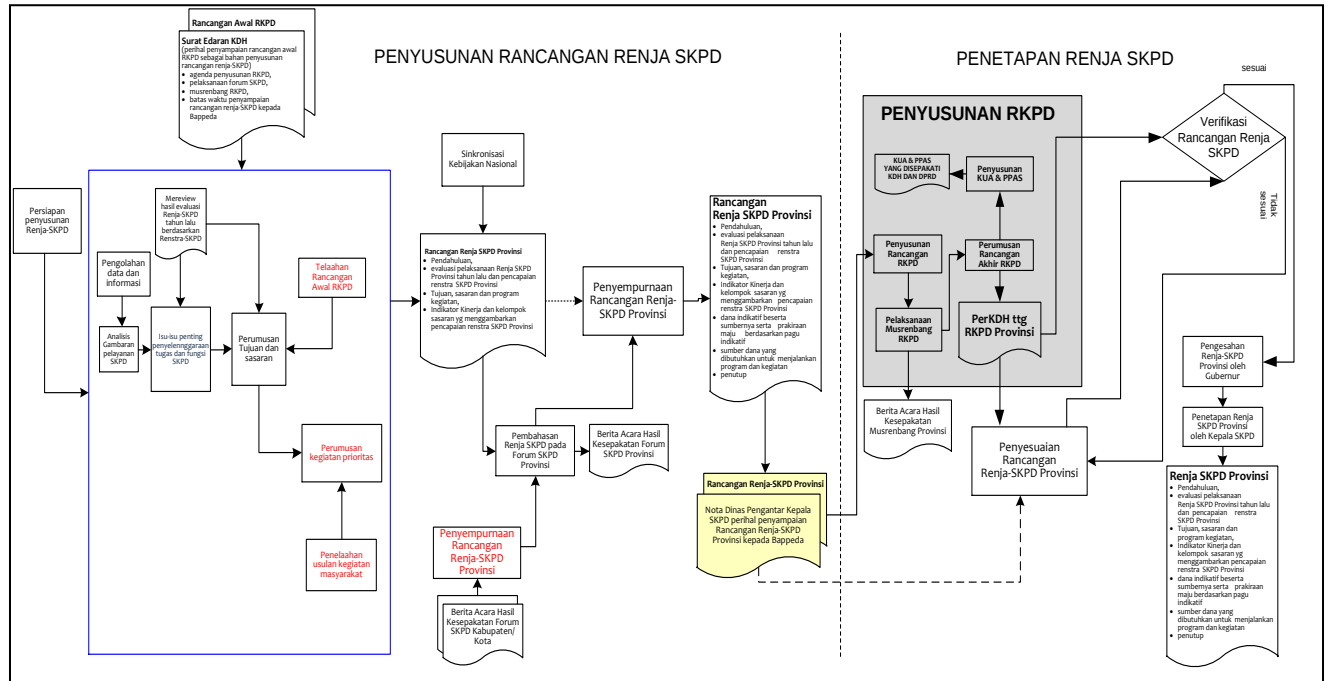
Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana daerah

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

Rencana Kerja Perubahan BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026, tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu BPBD harus mampu mengambil peran secara optimal, utamanya di dalam penganggulangan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja BPBD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra BPBD 2021-2026.

Peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja harus mengacu pada Renstra Perangkat

Daerah dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031)

2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pencegahan, penanggulangan bencana , kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2022 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana penanggulangan bencana.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.

4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN,** Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,** Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,** Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan

**BAB IV PENUTUP,** Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 s.d Tahun berjalan(\*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :



|   |    |    |      |    |                                                                               |                                                                                             |             |           |           |           |           |            |            |         |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu                                         | 13 Dokumen  | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 23 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu                                           | 12 Dokumen  | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 2 Dokumen  | 3 Dokumen  | 25 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                            | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu                                           | 12 Dokumen  | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 2 Dokumen  | 3 Dokumen  | 25 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                     | 60 Dokumen  | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 17 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 |    | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</b>                      | 100 %       | 0 %       | 0 %       | 0 %       | #DIV/0! % | 100 %      | 89.47 %    | 89.47 % |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan                                              | 120 Orang   | 0 Orang   | 0 Orang   | 0 Orang   | #DIV/0! % | 19 Orang   | 15 Orang   | 13 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu | 108 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 17 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)                     | 4 Dokumen   | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 0 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0 %     |

|   |    |    |      |    |                                                                        |                                                                                       |            |           |           |           |           |           |           |       |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 05 | 01 | 2.03 |    | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar</b>                           | 100 %      | 0 %       | 0 %       | 0 %       | #DIV/0! % | 100 %     | 100 %     | 100 % |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD              | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)  | 8 Dokumen  | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 %   |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun       | 24 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 17 %  |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD      | Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)     | 4 Dokumen  | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 %   |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 |    | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | <b>Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> | 100 %      | 0 %       | 0 %       | 0 %       | #DIV/0! % | 100 %     | 125 %     | 125 % |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan                     | 105 stel   | 0 stel    | 0 stel    | 0 stel    | #DIV/0! % | 18 stel   | 18 stel   | 17 %  |
| 1 | 05 | 02 | 01   | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | 83 Orang   | 0 Orang   | 0 Orang   | 0 Orang   | #DIV/0! % | 10 Orang  | 15 Orang  | 18 %  |

|   |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                |            |           |           |           |           |           |           |         |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 05 | 02 | 01   | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)      | 4 Laporan  | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 Laporan | #DIV/0! % | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 %     |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 |    | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah</b> | 100 %      | 0 %       | 0 %       | 0 %       | #DIV/0! % | 100 %     | 105.3 %   | 105.3 % |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                   | 120 jenis  | 0 jenis   | 0 jenis   | 0 jenis   | #DIV/0! % | 20 jenis  | 19 jenis  | 16 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah tamu yang difasilitasi                                                  | 1625 orang | 0 Orang   | 0 Orang   | 0 Orang   | #DIV/0! % | 275 Orang | 272 Orang | 17 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan  | 48 jenis   | 0 jenis   | 0 jenis   | 0 jenis   | #DIV/0! % | 8 jenis   | 8 jenis   | 17 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                | 360 eksp   | 0 eksp    | 0 eksp    | 0 eksp    | #DIV/0! % | 60 eksp   | 60 eksp   | 17 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)   | 4 Dokumen  | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 %     |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan                     | 18 jenis   | 0 jenis   | 0 jenis   | 0 jenis   | #DIV/0! % | 3 jenis   | 3 jenis   | 17 %    |

|   |    |    |      |    |                                                                                  |                                                                                                |          |        |        |        |           |         |         |         |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                                       | 353 kali | 0 kali | 0 kali | 0 kali | #DIV/0! % | 58 kali | 80 kali | 23 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 |    | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi</b>                                | 100 %    | 0 %    | 0 %    | 0 %    | #DIV/0! % | 100 %   | 85.71 % | 85.71 % |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)                                                    | 1 Unit   | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | #DIV/0! % | 0 Unit  | 0 Unit  | 0 %     |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                            | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan                                                   | 91 unit  | 0 unit | 0 unit | 0 unit | #DIV/0! % | 7 unit  | 6 unit  | 7 %     |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) | 8 unit   | 0 unit | 0 unit | 0 unit | #DIV/0! % | 0 unit  | 0 unit  | 0 %     |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                                  | Jumlah mebel yang diadakan (unit)                                                              | 27 unit  | 0 unit | 0 unit | 0 unit | #DIV/0! % | 0 unit  | 0 unit  | 0 %     |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)           | 1 unit   | 0 unit | 0 unit | 0 unit | #DIV/0! % | 0 unit  | 0 unit  | 0 %     |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                              | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)                                                    | 2 unit   | 0 unit | 0 unit | 0 unit | #DIV/0! % | 0 unit  | 0 unit  | 0 %     |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                  |              |            |            |            |           |             |             |         |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)                                      | 2 unit       | 0 unit     | 0 unit     | 0 unit     | #DIV/0! % | 0 unit      | 0 unit      | 0 %     |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 |    | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>            | 100 %        | 0 %        | 0 %        | 0 %        | #DIV/0! % | 100 %       | 99.86 %     | 99.86 % |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                             | 2400 Surat   | 0 surat    | 0 surat    | 0 surat    | #DIV/0! % | 400 surat   | 498 surat   | 21 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan                                         | 12 orang     | 0 Orang    | 0 Orang    | 0 Orang    | #DIV/0! % | 2 Orang     | 2 Orang     | 17 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                        | 216 rekening | 0 rekening | 0 rekening | 0 rekening | #DIV/0! % | 36 rekening | 36 rekening | 17 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 |    | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                            | <b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b> | 100 %        | 0 %        | 0 %        | 0 %        | #DIV/0! % | 100 %       | 93.25 %     | 93.25 % |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara                                 | 15 unit      | 0 unit     | 0 unit     | 0 unit     | #DIV/0! % | 13 unit     | 13 unit     | 87 %    |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |          |        |        |        |           |         |             |         |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------------|---------|
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/R<br>ehabilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                                              | Jumlah gedung<br>kantor dan/atau<br>bangunan lainnya<br>yang<br>dipelihara/direhabi<br>litasi                                                 | 12 unit  | 0 unit | 0 unit | 0 unit | #DIV/0! % | 2 unit  | 2 unit      | 17 %    |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                         | Jumlah peralatan<br>dan mesin lainnya<br>yang dipelihara                                                                                      | 110 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | #DIV/0! % | 79 unit | 63 unit     | 57 %    |
| 1 | 05 | 02 | 05   |    | <b>URUSAN<br/>PEMERINTAH<br/>N BIDANG<br/>KETENTERAM<br/>AN DAN<br/>KETERTIBAN<br/>UMUM SERTA<br/>PERLINDUNGA<br/>N<br/>MASYARAKAT</b> |                                                                                                                                               |          |        |        |        |           |         |             |         |
| 1 | 05 | 02 | 05   | 06 | <b>PROGRAM<br/>PENANGGULA<br/>NGAN<br/>BENCANA</b>                                                                                     | (1) Persentase<br>warga negara<br>yang<br>memperoleh<br>layanan<br>informasi rawan<br>bencana                                                 | 100 %    | 0 %    | 0 %    | 0 %    | #DIV/0! % | 100 %   | 88.2<br>3 % | 88.23 % |
|   |    |    |      |    |                                                                                                                                        | 2) Persentase<br>warga negara<br>yang<br>memperoleh<br>layanan<br>pencegahan dan<br>kesiapsiagaan<br>terhadap<br>bencana                      | 100 %    | 0 %    | 0 %    | 0 %    | #DIV/0! % | 100 %   | 100 %       | 100 %   |
|   |    |    |      |    |                                                                                                                                        | (3) Persentase<br>warga negara<br>yang<br>memperoleh<br>layanan<br>penyelamatan<br>dan evakuasi<br>korban bencana<br>yang responsif<br>gender | 100 %    | 0 %    | 0 %    | 0 %    | #DIV/0! % | 100 %   | 100 %       | 100 %   |

|   |    |    |      |    |                                                                                                       |                                                                                            |            |           |           |           |           |           |           |         |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 05 | 03 | 2.01 |    | Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                             | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 0.75 %     | 0 %       | 0 %       | 0 %       | #DIV/0! % | 0.10 %    | 0.093 %   | 12.40 % |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal (dokumen)               | 1 Dokumen  | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | #DIV/0! % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 %     |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan                                                     | 2250 orang | 0 Orang   | 0 Orang   | 0 Orang   | #DIV/0! % | 300 Orang | 280 Orang | 12.44 % |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 |    | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                      | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 21.8 %     | 0 %       | 0 %       | 0 %       | #DIV/0! % | 0.21 %    | 0.33 %    | 1.51 %  |
|   |    |    |      |    |                                                                                                       | Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun                                    | 100 %      | 0 %       | 0 %       | 0 %       | #DIV/0! % | 100 %     | 100 %     | 100 %   |
| 1 | 05 | 02 | 06   |    | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                              | Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan                                       | 1175 orang | 0 orang   | 0 orang   | 0 orang   | #DIV/0!   | 150 orang | 150 orang | 13 %    |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat                                                     | 300 Orang  | 0 Orang   | 0 Orang   | 0 Orang   | #DIV/0! % | 45 Orang  | 44 Orang  | 14.67 % |

|   |    |    |      |    |                                                                |                                                                          |            |           |           |           |           |           |           |        |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota       | Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan                     | 1175 orang | 0 orang   | 0 orang   | 0 orang   | #DIV/0! % | 150 orang | 116 orang | 9.87 % |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 07 | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                        | Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun         | 6 dokumen  | 0 dokumen | 0 dokumen | 0 dokumen | #DIV/0! % | 1 dokumen | 1 dokumen | 17 %   |
|   |    |    |      |    |                                                                | Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun         | 6 dokumen  | 0 dokumen | 0 dokumen | 0 dokumen | #DIV/0! % | 1 dokumen | 1 dokumen | 17 %   |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota       | Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dok)        | 1 dokumen  | 0 dokumen | 0 dokumen | 0 dokumen | #DIV/0! % | 0 dokumen | 0 dokumen | 0 %    |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                           | Jumlah warga negara yang ikut pelatihan                                  | 2700 orang | 0 unit    | 0 unit    | 0 unit    | #DIV/0! % | 450 orang | 834 Orang | 31 %   |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk (Desa)                         | 20 Desa    | 0 desa    | 0 desa    | 0 desa    | #DIV/0! % | 0 desa    | 0 desa    | 0 %    |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 09 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                  | Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dokumen) | 2 dokumen  | 0 dokumen | 0 dokumen | 0 dokumen | #DIV/0! % | 0 dokumen | 0 dokumen | 0 %    |

|   |    |    |      |    |                                                                                                    |                                                                                                                      |          |        |        |        |           |         |         |       |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|-------|
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan                                                         | 136 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | #DIV/0! % | 20 unit | 20 unit | 15 %  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 |    | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                        | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender          | 100 %    | 0 %    | 0 %    | 0 %    | #DIV/0! % | 100 %   | 100 %   | 100 % |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 05 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                 | Persentase Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (%)                                            | 100 %    | 0 %    | 0 %    | 0 %    | #DIV/0! % | 0 %     | 0 %     | 0 %   |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota                                                       | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana                                   | 100 %    | 0 %    | 0 %    | 0 %    | #DIV/0! % | 100 %   | 100 %   | 100 % |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        | Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender | 100 %    | 0 %    | 0 %    | 0 %    | #DIV/0! % | 100 %   | 100 %   | 100 % |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 06 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit                                              | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit                | 100 %    | 0 %    | 0 %    | 0 %    | #DIV/0! % | 100 %   | 100 %   | 100 % |

|   |    |    |      |    |                                                                   |                                                                                                                     |                |               |               |               |           |               |               |       |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | 100 %          | 0 %           | 0 %           | 0 %           | #DIV/0! % | 100 %         | 100 %         | 100 % |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 |    | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>               | <b>Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan (%)</b>                                       | 100 %          | 0 %           | 0 %           | 0 %           | #DIV/0! % | 0 %           | 0 %           | 0 %   |
| 1 | 05 | 03 | 2.05 | 02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                      | Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi (Lembaga)                                                           | 1 Lembaga      | 0 lembaga     | 0 lembaga     | 0 lembaga     | #DIV/0! % | 0 lembaga     | 0 lembaga     | 0 %   |
| 1 | 05 | 03 | 2.05 | 01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota         | Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun (Dokumen)                                        | 9 dokumen      | 0 dokumen     | 0 dokumen     | 0 dokumen     | #DIV/0! % | 0 Dokumen     | 0 dokumen     | 0 %   |
| 1 | 05 | 03 | 2.05 | 05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana   | Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun                                                       | 16 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | #DIV/0! % | 0 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | 0 %   |
| 1 | 05 | 03 | 2.05 | 04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan          | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan (unit)               | 7 Unit         | 0 Unit        | 0 Unit        | 0 Unit        | #DIV/0! % | 0 Unit        | 0 Unit        | 0 %   |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang *ex officio* adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Luwu Timur**

| NO | Indikator                     | SPM/standar nasional                                                                          | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|    |                               |                                                                                               |     | Tahun 2020          | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020        | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                  |
|    |                               |                                                                                               |     | (thn n-2)           | (thn n-1)  | (tnn n)    | (thn n+1)  | (thn n-2)         | (thn n-1)  | (tnn n)    | (thn n+1)  |                  |
| 1  | 2                             | 3                                                                                             | 4   | 5                   | 6          | 7          | 8          | 9                 | 10         | 11         | 12         | 13               |
| 1  | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | -                                                                                             | -   | -                   | 0.43       | 0.44       | 0.45       | -                 | 0.43       | 0.44       | 0.45       |                  |
| 2  |                               | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)                       | -   | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 18.05%            | 88.23%     | 100%       | 100%       |                  |
| 3  |                               | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) | -   | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 14.41%            | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
| 4  |                               | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)      | -   | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       |                  |

- ❖ Capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

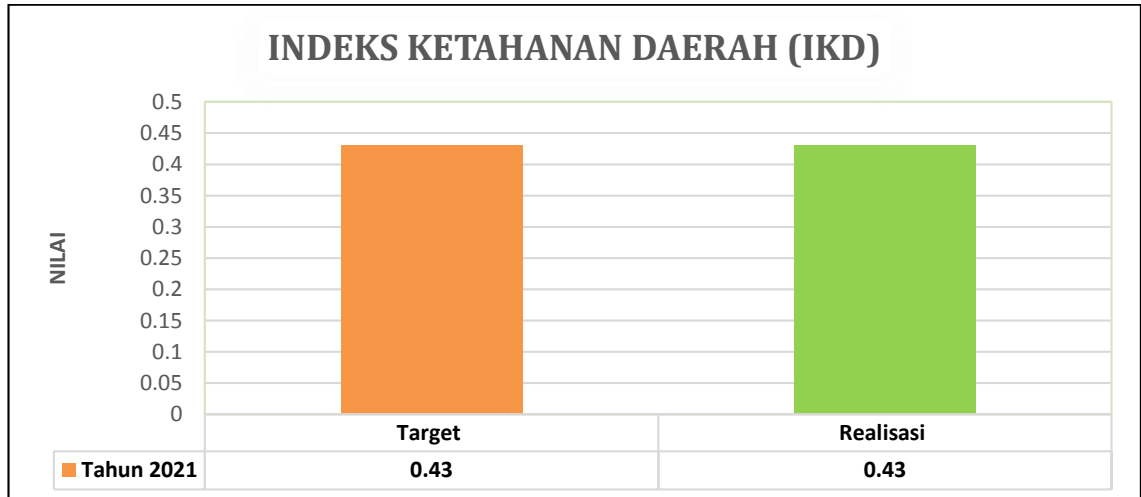
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Sasaran, Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

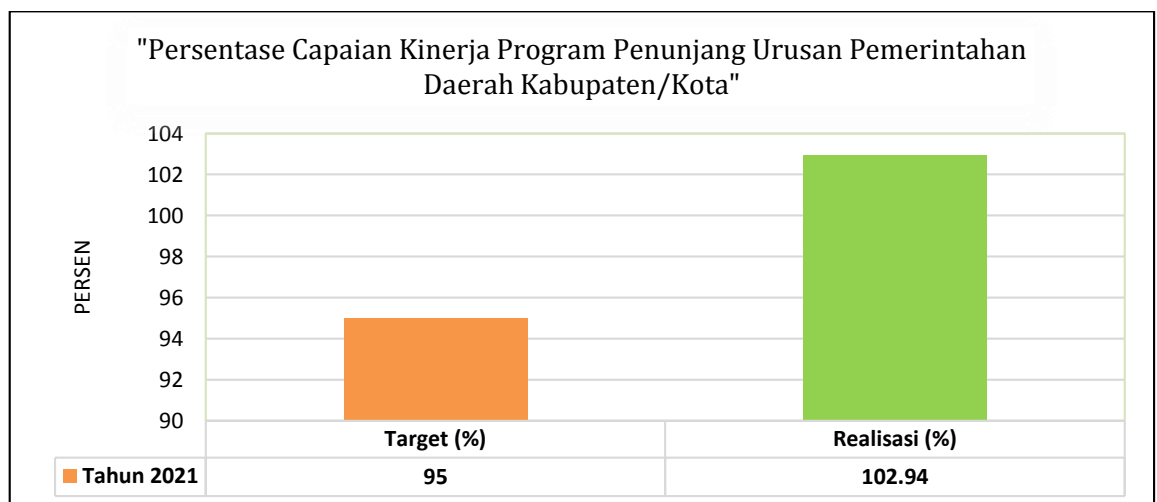
**Tabel. 5**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**

| NO | SASARAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET | REALISASI | CAPAIA N (%) | NOTIFIKA SI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                      | 4      | 5         | 6            | 7           |
| 1. | Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana                                     | Indeks Ketahanan Daerah                                                                | 0,43 % | 0,43 %    | 100          | ●           |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 95%    | 102,94%   | 108,36       | ●           |

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

**Sasaran Strategis I****Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana**

**Grafik. 3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021**

**Sasaran 2 (Sasaran Pendukung)****Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**

**Grafik. 4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2021**

## Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

### SASARAN STRATEGIS 1

#### “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana”

Tabel. 6  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

| Sasaran I                     | Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana |           |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja Sasaran     | Tahun 2021                                       |           |         |
|                               | Target                                           | Realisasi | Capaian |
| Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | 0.43                                             | 0.43      | 100%    |

## Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

---

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Nilai Indeks Ketahanan Daerah”**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2021 adalah 0,43 dan telah tercapai 0,43 dengan persentase capaian kinerja 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian target tersebut diperoleh dari pengimputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2021 yang bersumber dari OPD terkait seperti Bappelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan dsb.

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah :

1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :
  - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
  - Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2021 tentang SOTK BPBD

- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
  - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
  - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
  - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
  - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
  - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
  - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
  - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
- PUSDALOPS BPBD
  - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
  - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
  - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun
  - Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD
  - Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
  - Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu :
- Penataan Ruang berbasis PRB
  - Desa Tangguh Bencana
  - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospitasl Inco Soroako)
  - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas

5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
  - Rehabilitasi tanggul sungai
  - Normalisasi/Restorasi sungai
  - Pembangunan Bendung Sungai
  - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
  - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
  - Pembangunan Embung
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu :
  - Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
  - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
  - Penentuan Status Darurat Bencana
  - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
  - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
  - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
  - Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
  - Penghentian Status Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :
  - Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana).

**Grafik. 5**

Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021

**Tabel. 7**

Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021

| NO. | PRIORITAS                                               | INDEKS PRIORITAS | INDEKS KAPASITAS DAERAH | TINGKAT KAPASITAS DAERAH |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan                     | 0.57             | 0.43                    | SEDANG                   |
| 2   | Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu               | 0.80             |                         |                          |
| 3   | Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik      | 0.37             |                         |                          |
| 4   | Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana                | 0.63             |                         |                          |
| 5   | Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 0.56             |                         |                          |
| 6   | Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana  | 0.32             |                         |                          |
| 7   | Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana                   | 0.20             |                         |                          |

❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu :

- Program Penanggulangan Bencana :
  1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

➤ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
- Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Ketersediaan anggaran pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD baru dianggarkan pada tahun 2022.

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- segera melakukan FGD untuk penilaian IKD.

➤ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih dapat ditunda pelaksanaannya.
- Efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah
- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2021, BNPB memfasilitasi logistik untuk korban bencana yaitu : Logistik Siaga Darurat 10 paket, sandang 5 paket, Paket Kesehatan Keluarga 5 paket, Family Kit 5 paket, Logistik Pangan (Beras, Mie Instan, Air Mineral, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Gula Pasir) 100 paket, Perlengkapan Keluarga (Sabun Mandi, Sikat gigi, Pasta gigi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut, Sarung, Minyak Kayu putih) 70 paket, Perlengkapan Bayi (Minyak telon, Popok, Bedak Bayi) 70 paket, Shelter Kit (Terpal, Selimut, Alas Tidur) 60 paket dan Masker Medis 6000 pcs.
- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD sendiri, juga difasilitasi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dalam pelaksanaan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, capaian kinerja melebihi dari target yang direncanakan, dari target 450 org dan terealisasi 834 org karena adanya dukungan makanan dan minuman dari PT. Vale Indonesia dan dari Bank Sulselbar sehingga dalam pelaksanaan gladi dapat melibatkan banyak orang, dan hal ini berimplikasi terhadap capaian SPM urusan bencana.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada

beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbuan peringatan dini tersebut. Dan penyebaran informasi kebencanaan juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu PUSDALOPS BPBD.

- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 43 orang yang terdiri dari 15 orang PNS, 3 orang Upah Jasa, dan 25 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.
- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas

sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada.

### ❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel. 8**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

| Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja                                                                                              | Kinerja |           |         | Anggaran        |                  |         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------|------------------|---------|
|                                                  |                                                                                                                | Target  | Realisasi | Capaian | Alokasi         | Realisasi        | Capaian |
| 1                                                | 2                                                                                                              | 3       | 4         | 5       | 6               | 7                | 8       |
| Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana | Indeks Ketahanan Daerah (IKD)                                                                                  | 0.43    | 0.43      | 100%    | 1.948.307.027   | 1.639.892.198,20 | 84,17%  |
| Program Penanggulangan Bencana                   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                        | 100%    | 88.23%    | 88.23%  | 107.286.470,-   | 86.193.250,-     | 80,34%  |
|                                                  | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                  | 100%    | 100%      | 100%    | 634.827.561,-   | 538.465.344,20   | 84,82%  |
|                                                  | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender | 100%    | 100%      | 100%    | 1.206.192.996,- | 716.108.231      | 97,79%  |

**Tabel. 9**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja             | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi Biaya |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                                                | 2                             | 3                 | 4                     | 5                         |
| Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | 100%              | 84,17%                | 15,83%                    |

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 84,17%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 15,83%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

- Adanya Data Base (Baseline 2018) berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang merupakan bagian dari penilaian Kota Tangguh Bencana pada Tahun 2018
- Telah dilakukan pemutakhiran data IKD pada bulan Nopember 2021 oleh BPBD Propinsi Sul-Sel
- Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD tahun 2018 yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Banjir, PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026.

### Standar Pelayanan Minimal (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun **Target nasional** dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah **100% setiap tahun**. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 12

Target SPM Capaian Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                   | Indikator Pencapaian                                                                      | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                         | 4              | 5                   |
| 1  | Pelayanan Informasi Rawan Bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 100%           | Setiap Tahun        |
| 2  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100%           | Setiap Tahun        |
| 3  | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | 100%           | Setiap Tahun        |

Tabel. 13  
**Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                   | Uraian Kinerja                                                                            |            |               | Anggaran      |                | (%)   |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|-------|
|    |                                                         | Indikator Capaian                                                                         | Target (%) | Realisasi (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |       |
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                         | 4          | 5             | 6             | 7              | 8     |
| 1  | Pelayanan Informasi Rawan bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 100%       | 88.23%        | 107,286,470   | 86,193,250     | 80.34 |
| 2  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100%       | 100%          | 290,937,586   | 256,392,350    | 88.13 |
| 3  | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | 100%       | 100%          | 1,206,192,996 | 1,015,233,604  | 84.17 |

**Tabel. 14**  
**Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                          | Program/ Kegiatan / sub Kegiatan                                                                   | Alokasi Biaya |                      |                           |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
|    |                                                                |                                                                                                    | Anggaran      |                      |                           |
|    |                                                                |                                                                                                    | APBN          | APBD                 | Sumber dana lain yang sah |
| 1  | 2                                                              | 3                                                                                                  | 4             | 5                    | 6                         |
|    |                                                                | <b>Program Penanggulangan Bencana</b>                                                              | -             | <b>1,604,417,052</b> | -                         |
| 1  | <b>Pelayanan Informasi Rawan bencana</b>                       | <b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                   | -             | <b>107,286,470</b>   | -                         |
|    |                                                                | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota                  | -             | 107,286,470          | -                         |
| 2  | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b> | <b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                            | -             | <b>290,937,586</b>   | -                         |
|    |                                                                | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | -             | 144,178,556          | -                         |
|    |                                                                | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | -             | 9,000,000            | -                         |
|    |                                                                | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                               | -             | 85,784,820           | -                         |
|    |                                                                | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                               | -             | 51,974,210           | -                         |
| 3  | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>      | <b>Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                                           | -             | <b>1,206,192,996</b> | -                         |
|    |                                                                | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota                                                       | -             | 775,623,100          | -                         |
|    |                                                                | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  | -             | 100,130,000          | -                         |
|    |                                                                | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        | -             | 160,491,078          | -                         |
|    |                                                                | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah Penyakit                                             | -             | 169,948,818          | -                         |

**Tabel. 15**  
**Kendala, Permasalahan dan Solusi**  
**SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

| NO  | JENIS PELAYANAN DASAR                                   | INDIKATOR CAPAIAN                                                                         | KENDALA/PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                     | (3)                                                                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | Pelayanan Informasi Rawan Bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | <p><b>(1).</b>Adanya penerapan PPKM yang semula dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4, menyebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya sampai dengan triwulan IV. Dan hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kehadiran peserta dalam pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana. Dan hal ini mempengaruhi tingkat capaian SPM.</p> <p><b>(2).</b>Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana</p> | <p><b>(1).</b>Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Hibauan Peringatan Dini dan Media Sosial, <b>(2).</b>Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, <b>(3).</b>Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.</p> |
| 2   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | <p><b>(1).</b> Adanya penerapan PPKM yang semula dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4, menyebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya sampai dengan triwulan IV. Dan hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kehadiran peserta dalam pelaksanaan kegiatan. Dan hal ini mempengaruhi tingkat capaian SPM. <b>(2).</b> Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana</p>                                                                | <p><b>(1).</b>Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, <b>(2).</b>Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 3   | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | <p><b>(1).</b>Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, <b>(2).</b>Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, <b>(3).</b>Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis</p>                                                                                               | <p><b>(1).</b>Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, <b>(2).</b>Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, <b>(3).</b>Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, <b>(4).</b> Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur</p>                                 |

## Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

---

### ❖ Program Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Tujuan program penanggulangan bencana** yaitu : memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Sasaran program adalah :** (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

**Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2021 adalah :**

1. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

**Formulasi :** “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.

Target tahun 2021 adalah 100% dan realisasi 88,23% dengan persentase capaian kinerja 88,23%. Capaian tersebut berasal dari

pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten 280 org, Layanan Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD 4.953 org, Papan himbauan informasi bencana di 9 kecamatan 234.687 org dan Rambu evakuasi di 8 desa di Kec. Malili 26.578 org dengan akumulasi sebesar 266.498 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 2 kecamatan yang tidak dipasang papan himbauan karena kondisinya rusak berat.

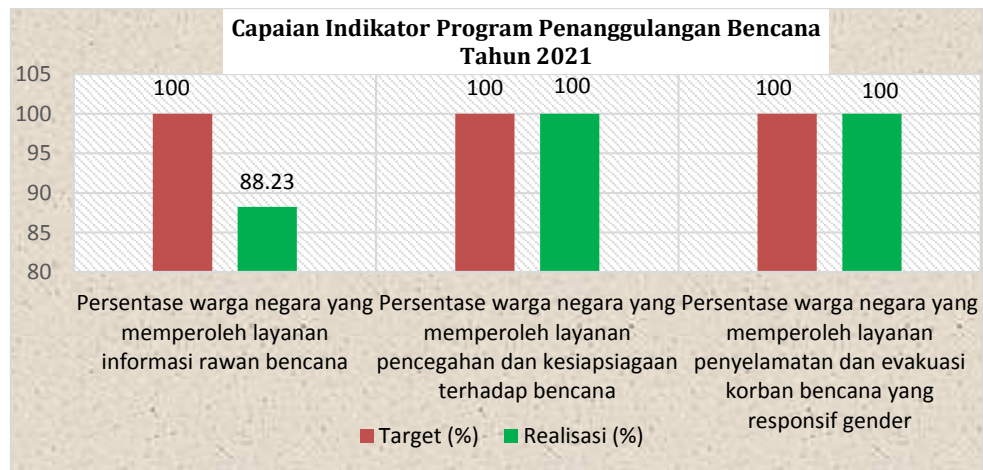
2. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana) **Formulasi** : *“Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”*.

Target tahun 2021 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 116 org, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 834 org, Penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi, Desa Atue dan Desa Kalpataru, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat deteksi gempa bumi sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

3. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

**Formulasi :** “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah seluruh keseluruhan korban bencana dikali seratus”.

Target tahun 2021 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total korban bencana dari 178 kejadian bencana yang terjadi di Kab. Luwu Timur.



**Grafik. 6**  
Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2021

Pada tahun 2021, Program Penanggulangan Bencana didukung oleh 3 kegiatan Utama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana yaitu :

**1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

**Tabel. 16**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**

| N o | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                 | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan                              | Target  | Realisasi | Capaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 1.  | Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                             | Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 0,10%   | 0,093 %   | 93%     |
| a.  | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana) | Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana                   | Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan                               | 300 org | 280 org   | 93,33%  |

**Pelayanan informasi rawan bencana adalah** pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi rawan bencana agar warga negara lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada diwilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard/bahaya) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

**Indikator kegiatan** adalah Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan **Formulasi** : Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti sosialisasi,

*komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus. Target Tahun 2021 adalah 0,10% (300 org) dan realisasi 0,093% (280 org) dengan persentase capaian kinerja 93%.*

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 300 orang dan realisasi 280 orang, persentase capaian 93,33%. Capaiannya kurang dari target karena kegiatan yang dilaksanakan akhir tahun dengan mengundang kepala desa, aparat desa dan relawan yang kemungkinan besar mempunyai kegiatan yang bersamaan pada akhir tahun. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada triwulan III namun baru dapat terlaksana pada triwulan IV karena adanya Instruksi Bupati terkait penerapan PPKM yang semula dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4 sehingga dihimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menghadirkan banyak orang yang berpotensi dalam penyebaran virus covid-19. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 107.286.470,- dan realisasi Rp. 86.193.250,- (80,34%) terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 21.093.220,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 280 orang dari 300 orang peserta yang diundang, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta sosialisasi. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai target yang telah direncanakan.

**Dokumentasi**



## 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

**Tabel. 17**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**

| N o | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                              | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan                                                    | Target  | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 1.  | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                   | Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 0,21%   | 0,33 %    | 157,14% |
|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun                                    | 100%    | 100%      | 100%    |
| a.  | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | Terlatihnya aparatur dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana                                                                                        | Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan                                       | 150 org | 116 org   | 77,33%  |
| b.  | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                   | Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan                               | 20 unit | 20 unit   | 100%    |
| c.  | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun                                                                                                  | Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun                           | 1 Dok   | 1 Dok     | 100%    |
|     |                                                                                                    | Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana                                                                                        | Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun                           | 1 Dok   | 1 Dok     | 100%    |
| d.  | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota                                       | Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana                                                                                                       | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat                                                     | 45 org  | 44 org    | 97,78%  |

|    |                                      |                                                                      |                                         |         |         |         |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
| e. | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang ikut pelatihan | 450 org | 834 org | 185,33% |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|

***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***

**adalah** serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

**Indikator kegiatan adalah** (1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun. Adapun formulasinya adalah *Jumlah aparatur dan warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi jumlah seluruh warga negara dan aparatur yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus*. Target dari indikator 1 adalah 0,21% (645 org) dan realisasi 0,33% (994 org) dengan persentase capaian kinerja 157,14%. Sedangkan target indikator 2 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Pencapaian target kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dengan target 150 orang dan realisasi 116 orang, persentase capaian kinerja 77,33%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena beberapa peserta tidak sempat hadir karena bertepatan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan

di akhir tahun. Berdasarkan anggaran kas sub kegiatan direncanakan pada Triwulan III karena adanya PPKM Level 4 maka kegiatan tersebut di tunda pelaksanaannya pada Triwulan IV. Disediakan anggaran sebesar Rp. 144.178.556,- dan terealisasi Rp. 128.714.150,- (89,27%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 15.464.406,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 116 orang dari 150 orang peserta yang diundang, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta pelatihan. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai dengan target yang telah direncanakan.

#### Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 20 unit

dan realisasi 20 unit, persentase capaian kinerja 100%. Adapun sarana dan prasarana yang diadakan yaitu pengadaan kantung jenazah. Disediakan anggaran sebesar Rp 9.000.000,- dan realisasi Rp 8.500.000,- (94,44%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 500.000,- yang merupakan sisa belanja.

#### Dokumentasi



#### - **Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat dengan target 45 orang dan realisasi 44 orang, persentase capaian kinerja 97,78%. Jenis pelatihan yang diberikan adalah Teknik Penyelamatan di Air (Water Rescue) dengan instruktur dari BASARNAS (Koord. Pos SAR Unit Siaga Luwu Timur) dan Koord. Pos TNI AL Lampia. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan II TA. 2021, namun pelaksanaannya ditunda sampai Triwulan III karena menyesuaikan waktu/kesediaan Narasumber dari BPBD Provinsi. Disediakan anggaran sebesar Rp. 85.784.820,- dan terealisasi Rp.68.059.200,- (79,34%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 17.725.620,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 44 orang dari target 45 org sehingga mempengaruhi realisasi belanja makan minum peserta, biaya sewa penginapan dan pengadaan baju peserta.

### Dokumentasi



#### - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 450 orang dan realisasi 834 orang dengan persentase capaian kinerja 185,33%. Realisasi Sub kegiatan ini terdiri dari Apel Siaga Bencana dengan jumlah peserta 450 org dan Simulasi dengan jumlah peserta 384 org. Jumlah peserta simulasi melebihi dari target karena guru-guru sangat antusias untuk menghadirkan murid-muridnya untuk menghadiri kegiatan. Sedangkan jumlah peserta Apel Siaga Bencana bisa melebihi target karena adanya dukungan makanan dan minuman dari PT. Vale Indonesia dan dari Bank Sulselbar, sehingga jumlah peserta Apel yang diundang lebih dari yang direncanakan. Disediakan Anggaran sebesar Rp. 51.974.210,- dan terealisasi Rp 51.119.000,- (98,35%). Dalam pelaksanaan Apel Siaga Bencana, jumlah peserta yang direncanakan hanya 200, namun yang diundang sebanyak 450 org dengan adanya dukungan makanan dan minuman untuk peserta dari PT. Vale Indonesia dan Bank Sulselbar, sehingga anggaran yang tersedia cukup untuk membiayai kegiatan.

### Dokumentasi Apel Siaga bencana



### Dokumentasi Simulasi Gempa



#### - Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang disusun dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen, persentase capaian kinerja 100%. Dokumen tersebut berisi rekomendasi usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan hasil identifikasi, dan akan diteruskan ke OPD terkait yang menangani ataupun dapat diusulkan ke BNPB (Dana Hibah

RR) melalui proposal. Selain penanganan pasca bencana, hasil identifikasi juga diarahkan untuk penanganan mitigasi bencana untuk wilayah yang berpotensi bencana, sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin. Disediakan anggaran sebesar Rp 343.889.975,- dan terealisasi Rp 282.072.994,- (82,02%). Realisasi keuangan terdiri dari belanja modal pekerjaan fisik Rp. 215.126.094,20, Belanja ATK Rp. 4.283.000,-, Belanja Perjalanan Biasa Rp. 62.663.900,-, sedangkan untuk Belanja Cetak dan Penggandaan tidak terealisasi disebabkan anggaran penggandaan menggunakan Administrasi Proyek pekerjaan fisik dan untuk jilid dilakukan sendiri dengan ATK yang tersedia dan untuk Belanja Makan dan Minum Rapat yang diperuntukkan untuk rapat-rapat koordinasi dengan OPD lain terkait penanganan sarana dan prasarana infrastruktur terdampak bencana juga tidak terealisasi karena tidak terdapat kejadian bencana yang memerlukan penanganan yang signifikan yang sifatnya lintas OPD.

### 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

**Tabel. 18**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                             | Target | Realisasi | Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1. | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana       | Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin       | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender         | 100%   | 100 %     | 100%    |
| a. | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota                      | Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana                                  | 100%   | 100%      | 100%    |
| b. | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana                        | Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | 100%   | 100%      | 100%    |

|    |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| c. | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana                            | Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender | 100% | 100% | 100% |
| d. | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit                        | Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit                | 100% | 100% | 100% |

***Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*** ***adalah*** serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman. Dengan dasar pemikiran bahwa keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

Kegiatan ini bertujuan untuk : (1) menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau dikhawatirkan akan hilang akibat bencana, (2) Menolong korban bencana yang sakit akibat bencana, (3) Menindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman.

***Indikator kegiatan adalah*** Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender dengan **Formulasi** : Jumlah korban bencana yang dicari, ditolong dan dievakuasi dibagi jumlah perkiraan korban bencana dikali seratus dengan target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja 100% karena berdasarkan jumlah kejadian bencana pada tahun 2021, terdapat 250 korban terdampak, dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dan semua kejadian bencana yang terjadi, direspon

kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Dari 178 kejadian terdapat 8 kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 153 kejadian (gempa bumi) dilakukan pengecekan data pada Sistem WRS (Warning Receiver System) dan dilaporkan ke pusat dan propinsi melalui PUSDALOPS BPBD. Cuaca ekstrim (angin kencang) 6 kejadian, Longsor 1 kejadian dan Kebakaran rumah 10 kejadian, difasilitasi dengan penyaluran bantuan logistik. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian bencana yang terjadi.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota**

**Indikator sub kegiatan adalah :** Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Desember 2021 (178 kejadian) yaitu Banjir 2 kejadian, orang hilang/tenggelam 5 kejadian, kebakaran rumah 10 kejadian, kebakaran lahan 0 kejadian, cuaca ekstrim 6 kejadian, longsor 2 kejadian dan gempa bumi 153 kejadian dan semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat BPBD. Disediakan anggaran sebesar Rp. 775.623.100,- dan terealisasi sebesar Rp 696.898.100,- atau sebesar 89,85 % dari pagu anggaran perubahan. Realisasi tidak sesuai dengan target karena terdapat 8 orang personil Tim Reaksi Cepat yang mengundurkan diri pada waktu yang berbeda dan terdapat juga 4 orang personil pengganti, sehingga berpengaruh terhadap realisasi belanja jasa (honor TRC) dan belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan TRC.

### Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman

**Indikator sub kegiatan adalah** Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana mulai bulan Januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa (124 laki-laki dan 126 perempuan) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Disediakan anggaran sebesar Rp 100.130.000,- dengan realisasi Rp. 57.656.000,-. atau sebesar 57,58 %. hal ini disebabkan karena hingga triwulan IV tidak terdapat kejadian bencana

berskala besar dan membutuhkan pembiayaan yang signifikan. Anggaran ini sifatnya disediakan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim diakhir tahun berdasarkan informasi kebencanaan yang ada.

### Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti hunian sementara (tenda), sandang, pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan sanitasi serta kebutuhan dasar lainnya

**Indikator sub kegiatan adalah** Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa (124 laki-laki dan 126 perempuan), dari jumlah tersebut, sebanyak 242 jiwa yang memerlukan bantuan logistik sedangkan selebihnya (korban org

hilang/tenggelam) hanya diberikan bantuan pertolongan dan evakuasi. Bantuan logistik yang diberikan berupa sandang pangan maupun hunian sementara (tenda). Disediakan anggaran sebesar Rp 160.491.078,- dengan realisasi keuangan Rp. 100.419.404,- atau sebesar 62,57 %. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu belanja sandang pangan Rp 33.905.000,- , belanja paket pengiriman Rp 15.000.000, serta perjalanan dinas Rp 8.993.596,-. Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi keuangan adalah tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan pembiayaan yang signifikan dan terdapat bantuan logistik penanggulangan bencana dari BPBD Provinsi di Makassar yang telah diserahkan pada bulan agustus 2021. Jenis bantuan logistik yang diperoleh dari propinsi yaitu : Logistik Siaga Darurat 10 paket, sandang 5 paket, Paket Kesehatan Keluarga 5 paket, Family Kit 5 paket, Logistik Pangan (Beras, Mie Instan, Air Mineral, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Gula Pasir) 100 paket, Perlengkapan Keluarga (Sabun Mandi, Sikat gigi, Pasta gigi, Shampoo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut, Sarung, Minyak Kayu putih) 70 paket, Perlengkapan Bayi (Minyak telon, Popok, Bedak Bayi) 70 paket, Shelter Kit (Terpal, Selimut, Alas Tidur) 60 paket, Masker Medis 6000 pcs. Untuk belanja paket pengiriman tidak terealisasi karena disediakan untuk biaya pengiriman peralatan namun terkendala administrasi sehingga tidak realisasi sampai akhir tahun.

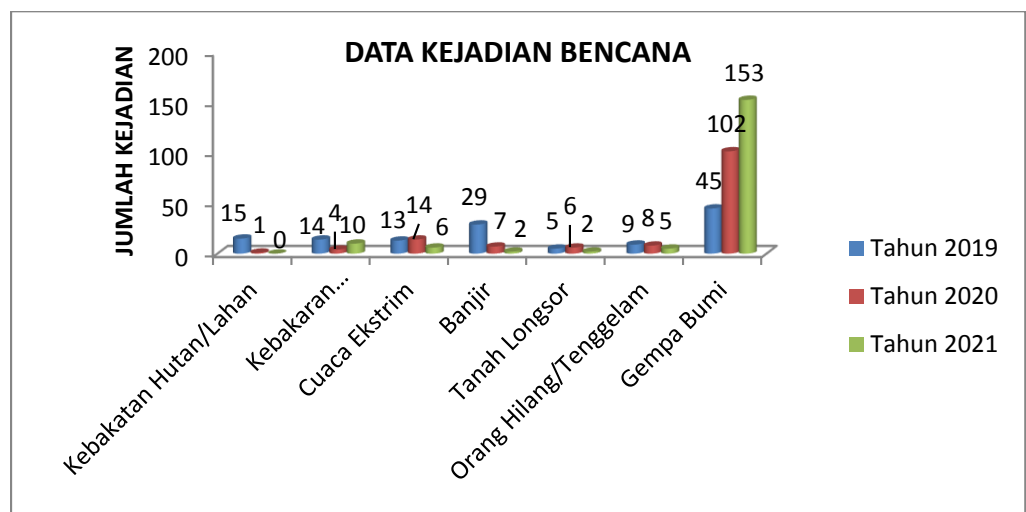
**Dokumentasi Penyaluran Bantuan Logistik**

- **Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit**

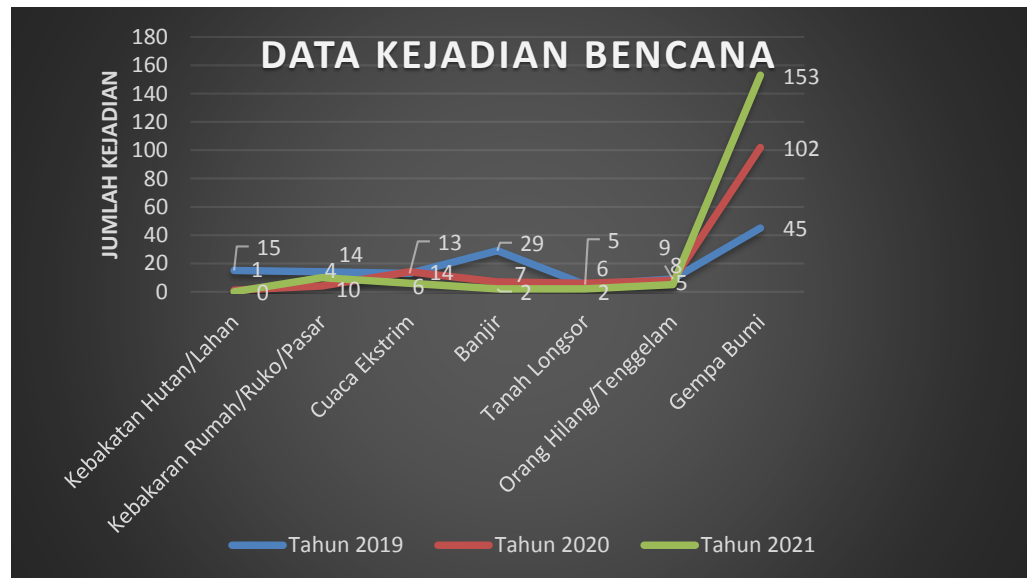
**Indikator sub kegiatan adalah** Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam (covid-19) yang ditangani oleh BPBD terkait penyemprotan disinfektan di tempat-tempat strategis sesuai permintaan serta pemulasaran dan pemakaman jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. Adapun jumlah masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) sebanyak 141 jiwa dan dilakukan respon cepat pemulasaran kurang dari 24 jam setiap informasi yang diterima oleh TRC BPBD. Disediakan anggaran sebesar Rp 169.948.818,- dengan realisasi anggaran Rp.160.260.100,-. atau sebesar 94,30%. Penggunaan anggaran yang cukup besar karena terjadi peningkatan jumlah korban meninggal terkonfirmasi Covid19 yang harus ditangani pada pertengahan tahun 2021 sampai awal bulan Desember 2021. Sisa anggaran sebesar Rp 9.688.718,- terdiri dari belanja ATK Rp 137.218,- belanja makan dan minum rapat Rp 5.250.000,- belanja makan dan minum aktifitas lapangan Rp 775.000,- dan belanja perjalanan dinas Rp 3.526.500,-. Belanja makan minum rapat

tidak terealisasi karena kegiatan rapat terkait penanganan covid-19 dilakukan di Dinas Kesehatan (Satgas Covid-19). sedangkan penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kegiatan pemulasaran jenazah covid-19 dilapangan.

**Dokumentasi Pemulasaran Jenazah Covid-19**



**Grafik. 7**  
Data Kejadian Bencana Tahun 2019-2021



**Grafik. 8**  
Data Kejadian Bencana Tahun 2019-2021

## SASARAN 2 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “**Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**” tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 19**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

| Sasaran Pendukung :                                                                    | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah |           |         | Notifikasi             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------|
| Indikator Kinerja Sasaran                                                              | Tahun 2021                                                                           |           |         |                        |
|                                                                                        | Target                                                                               | Realisasi | Capaian |                        |
| Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 95%                                                                                  | 102,94%   | 108,36% | <div><div></div></div> |

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

---

### ❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

**Indikator kinerja sasaran penunjang** adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah **“Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus”**.

Target Indikator sasaran penunjang adalah 95% dan realisasi 102,94% dengan persentase capaian kinerja 108,35%. Persentase capaian kinerja melebihi dari target karena beberapa kegiatan yang mendukung capaian program, realisasinya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraht
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Adanya refocussing anggaran yang berdampak pada pengurangan target beberapa sub kegiatan, khususnya terkait

pengadaan barang yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam RKBMD.

- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Akibat penerapan PPKM, beberapa sub kegiatan ditunda pelaksanaannya dan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun sehingga realisasi belanja yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan
- Terdapat beberapa jabatan struktural Eselon III dan IV yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- Keterbatasan personil pengelola kegiatan/sub kegiatan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Menyusun RKBMD Perubahan dan menganggarkan kembali pada tahun berikutnya
- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa
- Melakukan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan pada perubahan anggaran
- Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Mencermati sub kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
- Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang masih dapat ditunda pelaksanaannya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Efisiensi gaji dan tunjangan ASN
- Efisiensi belanja Bimtek
- Efisiensi pengadaan pakaian dinas
- Efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor
- Efisiensi biaya pemeliharaan peralatan kantor

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Terdapat beberapa jabatan struktural dan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Terkait refocussing beberapa sarana dan prasarana kantor yang masih bisa ditunda pelaksanaannya, maka yang dilakukan adalah memaksimalkan peralatan yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

**Tabel. 20**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

| Sasaran Pendukung                                                                    | Indikator Kinerja                                                                      | Kinerja |           |         | Anggaran        |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------|
|                                                                                      |                                                                                        | Target  | Realisasi | Capaian | Alokasi         | Realisasi       | Capaian |
| 1                                                                                    | 2                                                                                      | 3       | 4         | 5       | 6               | 7               | 8       |
| Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 95%     | 102,94%   | 108,36% | 2.967.663.734,- | 2.669.373.510,- | 89,95%  |

|                                                             |                                                                      |     |         |          |                  |                 |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|-----------------|--------|
| Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 95% | 102,94% | 108,36 % | 2.967.663.734 ,- | 2.669.373.510,- | 89,95% |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|-----------------|--------|

**Tabel. 21**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| Sasaran Pendukung                                                                    | Indikator Kinerja                                                                      | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi Biaya |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                                                                                    | 2                                                                                      | 3                 | 4                     | 5                         |
| Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 108,36%           | 89,95%                | 10,05%                    |

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 108,36% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,95%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 10,05%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

### Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

**Tabel. 24**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung**

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                               | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                      | Target 2021 | Target s.d TW 4 | Realisasi s.d TW 4 | Capaian (%) |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|
| I. | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 95%         | 95%             | 102,94 %           | 108,36%     |

|    |                                                                             |                                                                                                               |                                                                                |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100%   | 100%   | 125%   | 125%   |
| a. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu                                     | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                            | 3 Dok  | 3 Dok  | 3 Dok  | 100%   |
| b. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu                                                         | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu                               | 2 Dok  | 2 Dok  | 3 Dok  | 150%   |
| c. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                          | Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu                                                         | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu                               | 2 Dok  | 2 Dok  | 3 Dok  | 150%   |
| d. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu                                         | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu               | 10 Dok | 10 Dok | 10 Dok | 100%   |
| 2. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah                                                                 | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu                  | 100%   | 100%   | 89,47% | 89,47% |
| a. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN                                                                            | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan                                 | 19 Org | 19 Org | 15 Org | 78,95% |
| b. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan akhir tahun dengan baik                          | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu              | 18 Dok | 18 Dok | 18 Dok | 100%   |
| 3. | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             | Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah                        | Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar                              | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| a. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah                                    | Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu                 | 4 Dok  | 4 Dok  | 4 Dok  | 100%   |
| 4. | Kegiatan                                                                    | Tersedianya                                                                                                   | Persentase                                                                     | 100%   | 100%   | 125%   | 125%   |

|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | administrasi kepegawaian perangkat daerah                                         | Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani                                                   |          |          |          |         |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| a. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Tersedianya pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya untuk ASN dan upah jasa | Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan                       | 18 Stel  | 18 Stel  | 18 Stel  | 100%    |
| b. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur                                 | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 10 Org   | 10 Org   | 15 Org   | 150%    |
| 5. | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                  | Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar                    | 100%     | 100%     | 105,3%   | 105,3%  |
| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor           | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 8 Jenis  | 8 Jenis  | 8 Jenis  | 100%    |
| b. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran    | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                             | 20 Jenis | 20 Jenis | 19 Jenis | 95%     |
| c. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor                 | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                      | 3 Jenis  | 3 Jenis  | 3 Jenis  | 100%    |
| d. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                         | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                     | 60 Expl  | 60 Expl  | 60 Expl  | 100%    |
| e. | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu                                   | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya                                               | 275 Org  | 275 Org  | 272 Org  | 98,91%  |
| f. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah        | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan                         | 58 Kali  | 58 Kali  | 80 Kali  | 137,93% |
| 6. | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah                           | Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah                                        | Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang                                           | 100%     | 100%     | 85,71%   | 85,71%  |

|    |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                          |           |           |           |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|    | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                               | penunjang urusan pemerintah daerah                                                                              | terpenuhi                                                                |           |           |           |        |
| a. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor                                                      | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan                             | 7 Unit    | 7 Unit    | 6 Unit    | 85,71% |
| 7. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah                                      | Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia                           | 100%      | 100%      | 99,86%    | 99,86% |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik                                                     | Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda                              | 500 Surat | 500 Surat | 498 Surat | 99,60% |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan | 36 Rek    | 36 Rek    | 36 Rek    | 100%   |
| c. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran                                | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                 | 2 Org     | 2 Org     | 2 Org     | 100%   |
| 8. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai                            | Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara                         | 100%      | 100%      | 93,25%    | 93,25% |
| a. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik                                                          | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya           | 13 Unit   | 13 Unit   | 13 Unit   | 100%   |
| b. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik                                                          | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                       | 79 Unit   | 79 Unit   | 63 Unit   | 79,75% |
| c. | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor                                                                         | Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan                                        | 2 Unit    | 2 Unit    | 2Unit     | 100%   |

|  |                      |                     |                                        |  |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
|  | dan Bangunan Lainnya | lainnya dengan baik | Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi |  |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|

## ❖ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

**Indikator Program adalah** Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus**. Target 95% dan realisasi 102,94% dengan capaian kinerja 108,36%, dan menyerap anggaran sebesar 89,95%. Capaian kinerja program yang melebihi target karena beberapa kegiatan capaiannya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%. Hal ini disebabkan karena terdapat sub kegiatan yang seharusnya dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran dan disamping itu terdapat pula sub kegiatan pada Triwulan IV intensitas pelaksanaannya meningkat seperti pelaksanaan Bimtek/pelatihan dan Rapat-rapat koordinasi dsb. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan yaitu :

#### ➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Indikator kinerja kegiatan** adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 125%. Persentase capaian kinerja kegiatan melebihi dari target karena terdapat 2 sub kegiatan capaiannya > 100% yang seharusnya dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

#### - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target

sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen (100%). Adapun dokumen yang disusun adalah dokumen Renja Pokok Tahun 2022, Renja Perubahan 2021 dan Renstra BPBD 2021-2026. Disediakan anggaran sebesar Rp 22.315.263,- dan terelisasi Rp 20.277.000,-(90,87%). Sisa anggaran Rp 2.038.263,- terdiri dari, Belanja Cetak Rp 234.000 , makan dan minum rapat Rp 1.575.000, Belanja ATK Rp 119.263 serta perjalanan dinas luar daerah Rp 110.000. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**  
Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 3 dokumen (150%) yaitu penyusunan RKA Pergeseran dan RKA Perubahan 2021 serta RKA Pokok 2022. Realisasi yang melebihi target karena adanya refocusing anggaran sehingga dilakukan penyusunan RKA Pergeseran anggaran. Disediakan anggaran sebesar Rp 11.332.889,- dan terelisasi Rp 7.584.500,- (66,92%). Sisa anggaran Rp 3.748.389,- terdiri dari, Belanja Cetak Rp 85.400, makan dan minum rapat Rp 3.450.000 serta Belanja ATK Rp 213.889. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.
- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

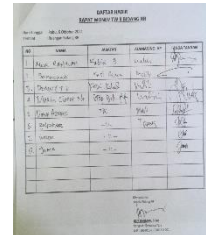
Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 3 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 150%, terdiri dari dokumen DPA-SKPD Tahun 2021 dan DPA Pergeseran Tahun 2021 serta DPA Perubahan Tahun 2021. Realisasi yang melebihi target karena adanya refocusing anggaran sehingga dilakukan penyusunan DPA Pergeseran anggaran. Disediakan anggaran sebesar Rp 8.004.079,- dan terelisasi Rp 6.039.400 (75,45%). Sisa anggaran Rp 1.964.679,- terdiri dari makan dan minum rapat Rp 1.550.000,- , Belanja ATK Rp 139.079 dan Belanja cetak Rp 275.600,-. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

- **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, target sebanyak 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100% yaitu LPPD, LKPJ, LAKIP, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2020, Dokumen Evaluasi RKPD TW 1 TA. 2021 dan Evaluasi Kinerja TW 1 TA. 2021, Dokumen Evaluasi kinerja TW 2 TA. 2021, Dokumen Evaluasi RKPD TW 2 TA. 2021, Dokumen Evaluasi RKPD TW 3 TA. 2021 serta Dokumen Evaluasi Kinerja TW3 TA. 2021. Disediakan anggaran sebesar Rp 53.827.481,- dan terelisasi Rp 43.828.098,- (81,42%). Sisa anggaran sebesar Rp 9.999.383,- terdiri dari Belanja ATK Rp 314.481,- Belanja Cetak Rp 253.400 dan Belanja makan dan minum rapat Rp 8.150.000 serta perjalanan dinas luar daerah Rp 1.281.402. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup

besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

### Dokumentasi Money Internal



#### ➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 89,47% dengan persentase capaian kinerja 89,74%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 78,95%, yang diakibatkan adanya beberapa jabatan struktural

eselon III dan IV yang belum terisi personil serta mutasi staf. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 19 org dan realisasi 15 org dengan persentase capaian kinerja 78,95 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan struktural eselon III dan IV yang belum terisi. Disediakan anggaran sebesar Rp 1.914.900.589,- dan terelisasi Rp 1.695.089.814,- (88,52%). Adanya jabatan struktural yang masih kosong mempengaruhi realisasi gaji dan tunjangan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, target 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen (100%) yaitu Laporan Bulanan Bendahara 12 Dokumen, Laporan Tahunan 1 Dokumen, LRA 1 Dokumen, Calk 1, Laporan Semester 1 dan 2 serta Laporan prognosis. Disediakan anggaran sebesar Rp 61.768.908,- dan terelisasi Rp 55.023.000,- (89,08%). Sisa anggaran Rp 6.745.908,- terdiri dari Belanja ATK Rp 80.908,-, Belanja Cetak Rp 565.000,- makan dan minum rapat Rp 3.875.000,- Honor tenaga administrasi Rp 1.000.000,- serta perjalanan dinas luar daerah Rp 1.225.000. Terdapat sisa belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat. Sedangkan honor tenaga administrasi tidak terealisasi selama 1 bulan karena adanya penggantian staf administrasi baru yang pembayaran honoranya disesuaikan dengan SK.

➤ **Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh.

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD sebanyak 4 dokumen (TW I s.d TW IV). Disediakan anggaran sebesar Rp 19.999.400 dan realisasi Rp 18.525.000 (92,63%) Sisa anggaran sebesar Rp 1.474.400,- terdiri dari, Belanja ATK Rp 854.400,- Belanja Cetak Rp 240.000,- , dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 380.000,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyusunan laporan.

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 125% dengan persentase capaian kinerja 125%. Capaian kinerja melebihi dari target, karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, capaian kinerjanya 150%, hal ini disebabkan karena pada Triwulan IV, banyak kegiatan Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPBD Propinsi maupun oleh Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan, dengan target 18 stel dan realisasi 18 stel (100%). Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2021 namun baru terealisasi pada triwulan III TA. 2021. Hal ini disebabkan karena PPTK terkendala bentuk pertanggungjawaban (SPJ) untuk belanja barang dan jasa pengadaan baju dinas sehingga dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pejabat pengadaan, disamping itu banyaknya OPD yang melakukan pemesanan pakaian dinas ditempat yang sama. Adapun pengadaannya terdiri Baju PSR eselon II 1 stel, PSR eselon III 3 stel, Baju PDH eselon IV 7 stel dan Baju PDH staf/upah jasa 7 stel. Disediakan anggaran sebesar Rp 15.350.000,- dan realisasi 100%.

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target sebanyak 10 org dan realisasi 15 orang (150%) yaitu Pelatihan resiko zoonosis berpotensi wabah 1 org, Pelatihan teknis sistem komando penanganan darurat bencana 2 org, Workshop RPB 1 org, pelatihan mitigasi dan sosialisasi KIE 1 org, Bimtek pengelolaan BMD 1 org, Bimtek penguatan SAKIP 2 org, Bimtek Pengelolaan arsip dinamis 1 org, Pelatihan manaj.posko tanggap darurat bencana 2 org, Pelatihan manaj. Logistik 1 org, Revolusi mentasl 1 org, Bimtek inovasi pelayanan publik 2 org. Capaian kinerja melebihi dari target yaitu sebesar 150%, hal ini disebabkan karena pada Triwulan IV, banyak kegiatan Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPBD Propinsi maupun oleh Daerah yang merupakan dampak dari pemberlakuan PPKM Level 2 dimana beberapa aktifitas/kegiatan sudah dapat

dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Disediakan anggaran sebesar Rp 57.100.000,- dan realisasi Rp 50.023.150,- (87,61%). Sisa anggaran sebesar Rp 7.076.850,- terdiri dari Belanja Bimtek Rp 4.500.000,- dan Belanja perjalanan dinas Rp 2.576.850,-. Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena Berdasarkan SBM, besaran untuk belanja bimtek/orang sebesar Rp 5.000.000, namun pada pelaksanaan beberapa bimtek yang diikuti, biaya kontribusi lebih rendah dari SBM sehingga terdapat sisa belanja. Begitu juga dengan belanja perjalanan dinas, beberapa kegiatan pelatihan yang diikuti ditanggung akomodasi dan konsumsi oleh Panitia penyelenggara sehingga besaran perjalanan dinas yang dibayarkan dibawah dari besaran perjalanan dinas dalam Standar Biaya Masukan. Dan pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan undangan pemanggilan peserta.

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : *Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus***. Target 100% dan realisasi 105,3% dengan persentase capaian kinerja 105,3%. Capaian kinerja melebihi dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian kinerjanya 137,93%, dan capaian tersebut berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, target 8 jenis, dan terealisasi 8 jenis (100%). Adapun komponen alat listrik

yang disediakan yaitu Kabel, steker, terminal, balon lampu, Lampu sorot, pitting lampu dan trafo. Kebutuhan alat listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Disediakan anggaran sebesar Rp 17.440.000,- dan terealisasi Rp 16.970.000,- (97,31%). Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 20 jenis dan realisasi 19 jenis (95%) terdiri dari BBM operasional, Oli pelumas dan 17 jenis alat dan bahan kebersihan. Dan disediakan anggaran sebesar Rp 29.349.250,- dan terealisasi Rp 27.930.500,- (95,17%). Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan, target 3 jenis setiap triwulan dan realisasi 3 jenis (100%) terdiri dari penggandaan, cetak dan jilid. Dan disediakan anggaran sebesar Rp 47.625.000,- dan terealisasi Rp 36.881.000,- (77,44%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 10.744.000,- Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena disediakan untuk belanja cetak baliho untuk peringatan hari-hari tertentu di Kab. Luwu Timur namun tidak dapat terealisasi.

**Dokumentasi Baliho peringatan dini bencana**



- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, target 60 ekpl dan terealisasi 60 ekpl dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Koran lokal 12 ekpl, Koran Nasional 12 ekpl dan Koran Regional 36 ekpl. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.120.000,- dan terealisasi Rp 6.120.000,- (100%).

- **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target sebanyak 275 org dan terealisasi 272 org dengan capaian kinerja 98,91%. Dan disediakan anggaran sebesar Rp 12.375.000,- dan terealisasi Rp 12.047.000,- (97,35%).

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target sebanyak 58 kali dan terealisasi 80 kali dengan capaian kinerja 137,93%. Capaian yang melebihi dari target disebabkan terdapat beberapa kegiatan urgen yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. Disamping itu beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD sehingga anggaran dapat digunakan lebih dari target yang direncanakan. Disediakan anggaran sebesar Rp 395.153.400,- dan terealisasi Rp 393.557.450,- (99,60%).

➤ **Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan **Formulasi : Jumlah capaian**

**kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.** Target 100% dan realisasi 85,71% dengan persentase capain kinerja 85,71%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena dari 7 unit peralatan dan mesin yang direncanakan, terealisasi hanya 6 unit. Hal ini disebabkan adanya 1 unit pengadaan barang yang spesifikasi yang termuat dalam DPA-SKPD dan tidak terdapat dipasaran. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan, target 7 unit dan terealisasi 6 unit (85,71%) yaitu Pengadaan Laptop 1 unit, Printer 2 unit, Scanner 1 unit dan Kursi kerja eselon IV 2 unit. Sedangkan lemari arsip tidak terealisasi karena spesifikasi yang diinginkan sesuai yang tercantum dalam DPA tidak terdapat dipasaran. Disediakan anggaran Rp 45.647.000,- dan realisasi Rp 37.875.000 (82,97%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.772.000,- terdiri dari belanja lemari arsip Rp 4.947.000,- dan sisa belanja kursi sebesar Rp 2.200.000.



➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan

**Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.** Target 100% dan realisasi 99,86% dengan persentase capaian kinerja 99,86%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target 500 surat dan terealisasi 498 surat dengan persentase capaian kinerja 99,6%. Terdiri dari 359 surat masuk dan 139 surat keluar. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.195.475,- dan realisasi Rp 3.740.500 (89,16%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 454.975,- terdiri dari belanja ATK Rp 294.975,- dan paket pengiriman Rp 160.000,-. Penggunaan anggaran untuk belanja paket pengiriman dan ATK disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target sebanyak 36 rekening dan realisasi 36 rekening dan terealisasi 36 rekening dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut karena dilakukan penyesuaian target pada saat perubahan anggaran. Disediakan anggaran sebesar Rp 52.500.000,- dan realisasi Rp 44.348.254 (84,47%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.151.746,- terdiri dari belanja Listrik Rp 6.840.746,-, belanja air Rp 631.000 dan belanja telepon Rp 680.000. Realisasi keuangan kurang dari 100% karena rendahnya pemakaian air kantor selama beberapa bulan. Disamping itu rekening telepon (Nomor ON CALL) yang terblokir, baru terbayarkan pada bulan Desember

2021. Dan terdapat penurunan pemakaian listrik selama beberapa bulan.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 2 orang dan realisasi 2 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan pejabat pengadaan. Disediakan anggaran sebesar Rp 19.800.000,- dan Realisasi Rp 19.800.000 (100%). Anggaran digunakan untuk pembayaran honor pejabat pengadaan dan cleaning service selama 12 bulan.

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 93,25% dengan persentase capaian kinerja 93,25%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena dari 3 sub kegiatan pengampuh, terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya capaian kinerjanya hanya 79,75%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara, target 13 unit dan realisasi 13 unit dengan persentase capaian kinerja 100%. Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu Motor 7 unit, Mobil Truk Serbaguna 1 unit, Double Cabin 2 unit, Mobil wtertreatment 1 unit dan mobil Operasional TRC 1 unit. Disediakan anggaran

sebesar Rp. 99.850.000,- dan realisasi Rp. 98.554.844,- (98,70%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.295.156,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang mengalami kerusakan.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, target sebanyak 79 unit dan terealisasi 63 unit dengan persentase capaian kinerja 79,75%. Realisasi yang tidak sesuai target karena beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Disediakan anggaran sebesar Rp. 43.010.000,- dan realisasi Rp. 30.295.000,- (70,44%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.715.000,-. Pada dasarnya penggunaan anggaran pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi peralatan yang memerlukan perbaikan.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, target 2 unit dan realisasi 2 unit (100%). Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah Perbaikan lantai Posko (Rabat beton) serta pengecatan gedung kantor BPBD dan Gudang Logistik serta pagar. Disediakan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi Rp. 29.514.000,- (98,38%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 486.000,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan gedung kantor BPBD dan gudang logistik.

### 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2022 antara lain :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
2. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2021, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 172 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 10 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 0 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 10 Kejadian), Cuaca Ekstrem 6 Kejadian, Banjir 2 Kejadian, Tanah Longsor 2 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 5 Kejadian dan Gempa Bumi 153 kejadian. Jumlah kejadian bencana tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dan kejadian bencana yang mendominasi di tahun 2021 yaitu Gempa Bumi. Kejadian tersebut kebanyakan terjadi di Luar Kabupaten Luwu Timur namun terasa getarannya. Intensitas kejadian gempa bumi meningkat setelah terjadinya kejadian gempa bumi akibat pergerakan sesar palu koro. Dan perlu menjadi perhatian yaitu adanya Sesar Matano serta keberadaan 3 Dam Seri Larona. Olehnya itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut.
3. Terdapat 3 (tiga) bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dibangun seri pada DAS Larona, aktifitas operasional dan mempengaruhi debit air sungai Larona yang selalu naik dan menggenangi areal persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kegagalan pada salah satu dam menjadi ancaman yang dapat menyebabkan bencana besar. Kondisi ini memerlukan upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana yang melibatkan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang akan terkena dampak.
4. Kondisi geografis Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas pegunungan yang terjal dan luas, sungai yang lebar dan dalam serta daerah pesisir yang menjadi tempat hunian masyarakat berpotensi bahaya dan

mengancam kehidupan masyarakat. Banyaknya korban manusia yang tenggelam di sungai, dilaut, dan hilang, membutuhkan upaya penyelamatan dan pencarian korban secara profesional. Olehnya itu keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan yang handal dibidang ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

5. Daerah rawan bencana (Penanganan Mitigasi Daerah Rawan Bencana)
6. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
8. Luasnya cakupan wilayah penanganan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil serta peralatan yang tersedia;
9. Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

### **1.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis**

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Prioritas program/kegiatan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
- b. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan ruang pada daerah-daerah yang rawan bencana berdasarkan kajian risiko bencana.
- c. Melakukan kajian resiko bencana pada daerah yang berpotensi bencana sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan penanggulangan bencana dan memulihkan kondisi yang rusak akibat bencana.

- d. Segera menyusun Rencana Kontijensi ancaman untuk setiap jenis ancaman bencana (mengesahkan, mensosialisasikan, dan menguji dalam geladi/simulas)
- e. Memetakan fasilitas umum penting di area rawan bencana; Sekolah, fasilitas kesehatan, Desa
- f. Melakukan upaya peringatan dini terhadap bencana yang mungkin dapat terjadi pada daerah-daerah rawan bencana.
- g. Meningkatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- h. Menegakkan peraturan pengelolaan lingkungan hidup dengan tegas.
- i. Membentuk Forum PRB Tingkat Kabupaten dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah
- j. Mengalokasikan minimal 1% APBD untuk Pengurangan Risiko Bencana (Pencegahan, Mitigasi, kesiapsiagaan dan EWS) dapat melekat pada OPD strategis tidak hanya di BPBD
- k. Mengalokasikan minimal 0.5% APBD untuk Belanja Tidak terduga khusus bencana
- l. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana.
- m. Menyediakan sarana dan prasana penanggulangan yang memadai.
- n. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- o. Membentuk Pos Terpadu Pelayanan Kedaruratan di Kabupaten Luwu Timur yang secara khusus dan professional menangani penyelamatan dan pencarian korban bencana.
- p. Mempersiapkan data terkait kebutuhan logistik dan stok ketersediaan pangan pada OPD terkait untuk mengantisipasi jika terjadi bencana.
- q. Mempersiapkan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait maupun dunia usaha dalam mengantisipasi kejadian bencana.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja Perubahan Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Pada proses perjalanannya, beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersediaan dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya. Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2022**  
**Kabupaten Luwu Timur**

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                       |                                                                                |                                       |                        |                | Hasil Analisa Kebutuhan                                                   |                                                                                |                                       |                        |                | Catatan Penting |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                              | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                              | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana |                 |
| 1   | 2                                                                         | 3                                                                              | 4                                     | 5                      | 6              | 7                                                                         | 8                                                                              | 9                                     | 10                     | 11             | 12              |
|     | BELANJA OPERASI                                                           |                                                                                |                                       |                        | 4,715,196,707  | BELANJA OPERASI                                                           |                                                                                |                                       |                        | 4,594,450,041  |                 |
| A   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota               | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar           | Kab. Luwu Timur                       | 95%                    | 3,064,952,615  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota               | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar           | Kab. Luwu Timur                       | 95%                    | 3,021,939,699  |                 |
| I   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu |                                       | 100%                   | 59,759,131     | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu |                                       | 100%                   | 68,069,131     |                 |
| 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu                            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah | 2 Dokumen              | 19,716,145     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu                            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah | 2 Dokumen              | 22,326,145     |                 |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu                               | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah | 2 Dokumen              | 4,785,466      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu                               | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah | 2 Dokumen              | 4,785,466      |                 |
| 3   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                        | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu                               | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah | 2 Dokumen              | 4,365,240      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                        | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu                               | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah | 2 Dokumen              | 4,365,240      |                 |

|     |                                                                               |                                                                                             |                                       |            |               |                                                                               |                                                                                             |                                       |            |               |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|--|
| 4   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah | 10 Dokumen | 30,892,280    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah | 10 Dokumen | 36,592,280    |  |
| II  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                             |                                       | 100%       | 2,232,876,011 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                  | Jumlah ATK yang disediakan (jenis)                                                          |                                       | 100%       | 2,109,329,383 |  |
| 5   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan                                              | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | 20 orang   | 2,193,059,189 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan                                              | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | 15 orang   | 2,061,562,561 |  |
| 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | 18 Dokumen | 39,816,822    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | 18 Dokumen | 47,766,822    |  |
| III | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah               | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar                                           |                                       | 100%       | 18,009,260    | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah               | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar                                           |                                       | 100%       | 18,009,260    |  |
| 10  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun             | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | 4 Dokumen  | 18,009,260    | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun             | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | 4 Dokumen  | 18,009,260    |  |
| IV  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                                       | 100%       | 35,500,000    | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                                       | 100%       | 45,780,000    |  |
| 11  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan                          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | -          | -             | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan                          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | -          | -             |  |

|    |                                                                  |                                                                                        |                                                    |             |             |                                                                  |                                                                                        |                                                   |             |             |  |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 13 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan  | 10 orang    | 35,500,000  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 15 orang    | 45,780,000  |  |
| V  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah                |                                                    | 100%        | 397,384,050 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah                |                                                   | 100%        | 478,776,450 |  |
| 14 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah              | 8 Jenis     | 12,625,000  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | 8 Jenis     | 17,125,000  |  |
| 15 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah              | 20 Jenis    | 29,349,250  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | 20 Jenis    | 29,349,250  |  |
| 16 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan                             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan | 3 Jenis     | 35,625,000  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan                             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Jenis     | 35,625,000  |  |
| 17 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah              | 60 exemplar | 6,120,000   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | 60 exemplar | 6,720,000   |  |
| 18 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah tamu yang difasilitasi                                                          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan | 275 orang   | 14,850,000  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah tamu yang difasilitasi                                                          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 275 orang   | 19,800,000  |  |

|      |                                                                           |                                                                                |                                                   |           |             |                                                                           |                                                                                |                                                   |           |             |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|--|
| 19   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                       | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 50 kali   | 298,814,800 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                       | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 69 kali   | 370,157,200 |  |
| VI   | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi                       |                                                   | 100%      | 112,168,000 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi                       |                                                   | 100%      | 112,168,000 |  |
| 22   | Pengadaan Mebel                                                           | Jumlah mebel yang diadakan                                                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 5 unit    | 8,000,000   | Pengadaan Mebel                                                           | Jumlah mebel yang diadakan                                                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 5 unit    | 8,000,000   |  |
| 23   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan                                   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 10 unit   | 29,268,000  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan                                   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 13 unit   | 29,268,000  |  |
| 24   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 1 unit    | 74,900,000  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 1 unit    | 74,900,000  |  |
| VIII | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |                                                   | 100%      | 86,416,163  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |                                                   | 100%      | 66,967,475  |  |
| 27   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400 surat | 4,195,475   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400 surat | 4,195,475   |  |

|      |                                                                                                                  |                                                                                           |                                                   |             |             |                                                                                                                  |                                                                                           |                                                   |             |             |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 28   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 36 Rekening | 62,420,688  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 36 Rekening | 42,972,000  |  |
| 29   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan                                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 2 orang     | 19,800,000  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan                                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 2 orang     | 19,800,000  |  |
| VIII | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik |                                                   | 100%        | 122,840,000 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik |                                                   | 100%        | 122,840,000 |  |
| 30   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara                          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13 unit     | 93,300,000  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara                          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13 unit     | 93,300,000  |  |
| 31   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97 unit     | 19,540,000  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 unit     | 19,540,000  |  |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                |                                                   |         |               |                                                                                                       |                                                                                                                |                                                   |         |               |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|--|
| 32 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 unit  | 10,000,000    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 unit  | 10,000,000    |  |
| B  | Program Penanggulangan Bencana                                                                        | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                        | Kab. Luwu Timur                                   | 100%    | 1,650,244,092 | Program Penanggulangan Bencana                                                                        | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                        | Kab. Luwu Timur                                   | 100%    | 1,572,510,342 |  |
|    |                                                                                                       | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                  |                                                   | 100%    |               |                                                                                                       | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                  |                                                   | 100%    |               |  |
|    |                                                                                                       | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender |                                                   | 100%    |               |                                                                                                       | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender |                                                   | 100%    |               |  |
| IX | Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                             | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                           |                                                   | 0.10%   | 75,368,925    | Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                             | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                           |                                                   | 0.09%   | 72,518,925    |  |
| 33 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan                                                                         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300 org | 75,368,925    | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan                                                                         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 262 org | 72,518,925    |  |

|    |                                                                                                    |                                                                                            |                                                   |           |             |                                                                                                    |                                                                                            |                                                   |           |             |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|--|
| X  | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                   | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |                                                   | 2.12%     | 587,139,418 | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                   | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |                                                   | 2.117%    | 571,728,418 |  |
|    |                                                                                                    | Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun                                    |                                                   | 100%      |             |                                                                                                    | Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun                                    |                                                   | 100%      |             |  |
| 34 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan                                       | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 org   | 76,939,270  | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan                                       | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 org   | 76,939,270  |  |
| 35 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan                               | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 20 unit   | 9,000,000   | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan                               | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 47 unit   | 18,000,000  |  |
| 36 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                     | Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk                                                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 4 Desa    | 128,622,720 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                     | Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk                                                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 4 Desa    | 128,622,720 |  |
| 37 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                             | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 59,971,628  | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                             | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 59,971,628  |  |
|    |                                                                                                    | Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun                                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 1 Dokumen |             |                                                                                                    | Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun                                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 1 Dokumen |             |  |

|    |                                                                      |                                                                                                                     |                                                   |           |             |                                                                      |                                                                                                                     |                                                   |           |             |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|--|
| 38 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat                                                                              | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 50 orang  | 74,425,850  | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat                                                                              | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah             | 40 orang  | 64,014,850  |  |
| 39 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                        | Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal                                                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 1 Dokumen | 208,299,980 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                        | Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal                                                      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 1 Dokumen | 191,799,980 |  |
| 40 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                 | Jumlah warga negara yang ikut pelatihan                                                                             | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | 250 org   | 29,879,970  | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                 | Jumlah warga negara yang ikut pelatihan                                                                             | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | 250 org   | 32,379,970  |  |
| XI | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana          | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender         |                                                   | 100%      | 967,745,660 | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana          | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender         |                                                   | 100%      | 908,272,910 |  |
| 41 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                          | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana                                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %     | 749,991,800 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                          | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana                                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %     | 665,091,800 |  |
| 42 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota    | Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %     | 69,477,500  | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota    | Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %     | 69,477,500  |  |

|                     |                                                                             |                                                                                                                      |                                                   |           |                      |                                                                             |                                                                                                                      |                                                   |           |            |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| 43                  | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %     | 59,995,500           | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %     | 85,422,750 |                      |
| 44                  | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana                                                | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %     | 29,254,820           | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana                                                | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %     | 29,254,820 |                      |
| 45                  | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit                        | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit                | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %     | 59,026,040           | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit                        | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit                | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %     | 59,026,040 |                      |
| XII                 | Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                       | Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan                                                   |                                                   | 100 %     | 19,990,089           | Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                       | Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan                                                   |                                                   | 100 %     | 19,990,089 |                      |
| 46                  | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                   | Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun                                                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 3 Dokumen | 19,990,089           | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                   | Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun                                                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 3 Dokumen | 19,990,089 |                      |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                                                             |                                                                                                                      |                                                   |           | <b>4,715,196,707</b> | <b>JUMLAH TOTAL</b>                                                         |                                                                                                                      |                                                   |           |            | <b>4,594,450,041</b> |

## **2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Perusahaan/ Instansi Swasta, yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja. Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Dan pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022, tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan.

**Tabel (T-C.32)**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kabupaten Luwu Timur**

| No | Program/Kegiatan | Lokasi           | Indikator Kinerja | Besaran/VOLUME | Catatan |
|----|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------|
| 1  | 2                | 3                | 4                 | 5              | 6       |
|    |                  |                  |                   |                |         |
|    |                  | <b>TIDAK ADA</b> |                   |                |         |
|    |                  |                  |                   |                |         |
|    |                  |                  |                   |                |         |
|    |                  |                  |                   |                |         |
|    |                  |                  |                   |                |         |

## BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan 2 program dan 37 kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 4.594.450.041,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL. 7  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

| No  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                               | Rencana Tahun 2022 (N) |                                |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana       |
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                            | (4)                    | (5)                            | (6)               |
|     | Non Urusan                                                                               |                                                                                |                        |                                |                   |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                          |                                                                                |                        |                                |                   |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                |                        |                                |                   |
|     | BELANJA OPERASI                                                                          |                                                                                |                        | 4,594,450,041                  |                   |
|     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA                                    | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar           | 100%                   | 3,021,939,699                  | Pendapatan Daerah |
| I   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100%                   | 68,069,131                     | Pendapatan Daerah |
| 1   | Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu                            | 3 Dokumen              | 22,326,145                     | Pendapatan Daerah |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu                               | 2 Dokumen              | 4,785,466                      | Pendapatan Daerah |
| 3   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu                               | 2 Dokumen              | 4,365,240                      | Pendapatan Daerah |
| 4   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu               | 10 Dokumen             | 36,592,280                     | Pendapatan Daerah |
| II  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                | 100%                   | 2,109,329,383                  | Pendapatan Daerah |
| 5   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya                              | 16 orang               | 2,061,562,561                  | Pendapatan Daerah |

|     |                                                                             |                                                                                          |             |                    |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu                        | 18 Dokumen  | 47,766,822         | Pendapatan Daerah        |
| III | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>                           | <b>Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar</b>                              | <b>100%</b> | <b>18,009,260</b>  | Pendapatan Daerah        |
| 7   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu           | 4 Dokumen   | 18,009,260         | Pendapatan Daerah        |
| IV  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | <b>Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>    | <b>100%</b> | <b>45,780,000</b>  | <b>Pendapatan Daerah</b> |
| 8   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                      | Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan                       | 0           | 0                  | Pendapatan Daerah        |
| 9   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                  | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | 15 orang    | 45,780,000         | Pendapatan Daerah        |
| V   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah</b>          | <b>100%</b> | <b>478,776,450</b> | <b>Pendapatan Daerah</b> |
| 10  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 8 Jenis     | 17,125,000         | Pendapatan Daerah        |
| 11  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                             | 20 Jenis    | 29,349,250         | Pendapatan Daerah        |
| 12  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                      | 3 Jenis     | 35,625,000         | Pendapatan Daerah        |
| 13  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan                     | 60 exemplar | 6,720,000          | Pendapatan Daerah        |
| 14  | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya                                               | 275 orang   | 19,800,000         | Pendapatan Daerah        |
| 15  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan                         | 69 kali     | 370,157,200        | Pendapatan Daerah        |
| VI  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>     | <b>Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi</b>                          | <b>100%</b> | <b>112,168,000</b> | <b>Pendapatan Daerah</b> |
| 16  | Pengadaan Mebel                                                             | Jumlah mebel yang diadakan                                                               | 5 Unit      | 8,000,000          | Pendapatan Daerah        |
| 17  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan                                             | 13 Unit     | 29,268,000         | Pendapatan Daerah        |
| 18  | Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                               | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan                                 | 1 unit      | 74,900,000         | Pendapatan Daerah        |
| VII | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>    | <b>100%</b> | <b>66,967,475</b>  | <b>Pendapatan Daerah</b> |
| 19  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                              | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda                                        | 400 surat   | 4,195,475          | Pendapatan Daerah        |
| 20  | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | Jumlah Rekening Bulanan Telepon, Air dan Listrik Kantor yang terbayarkan                 | 36 rekening | 42,972,000         | Pendapatan Daerah        |
| 21  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                              | Jumlah jasa tenaga pelayanan                                                             | 2 orang     | 19,800,000         | Pendapatan Daerah        |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                       |               |                      |                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
|      | Kantor                                                                                                          | umum kantor yang disediakan                                                                                           |               |                      |                          |
| VIII | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>                      | <b>100%</b>   | <b>122,840,000</b>   | <b>Pendapatan Daerah</b> |
| 22   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                                                        | 13 unit       | 93,300,000           | Pendapatan Daerah        |
| 23   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                                    | 35 unit       | 19,540,000           | Pendapatan Daerah        |
| 24   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                              | 2 unit        | 10,000,000           | Pendapatan Daerah        |
|      | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                           | <b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>                                        | <b>100%</b>   | <b>1,572,510,342</b> | <b>Pendapatan Daerah</b> |
|      |                                                                                                                 | <b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>                  | <b>100%</b>   |                      |                          |
|      |                                                                                                                 | <b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender</b> | <b>100%</b>   |                      |                          |
| IX   | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                                         | <b>Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>                                           | <b>100%</b>   | <b>72,518,925</b>    | <b>Pendapatan Daerah</b> |
| 25   | Sosialisasi, Komonikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)           | Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan                                                                                | 262 orang     | 72,518,925           | Pendapatan Daerah        |
| X    | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                                  | <b>Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>                     | <b>2.117%</b> | <b>571,728,418</b>   | <b>Pendapatan Daerah</b> |
|      |                                                                                                                 | <b>Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun</b>                                                        | <b>100%</b>   |                      |                          |
| 26   | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan                                                                  | 100 org       | 76,939,270           | Pendapatan Daerah        |
| 27   | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota              | Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan                                                          | 47 unit       | 18,000,000           | Pendapatan Daerah        |
| 28   | Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan                                                  | Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk                                                                            | 4 Desa        | 128,622,720          | Pendapatan Daerah        |
| 29   | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun                                                      | 1 Dokumen     | 59,971,628           | Pendapatan Daerah        |

|              |                                                                             |                                                                                                                    |              |                      |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
|              |                                                                             | Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun                                                   | 1<br>Dokumen |                      |                          |
| 30           | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota        | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat                                                                             | 40 orang     | 64,014,850           | Pendapatan Daerah        |
| 31           | Penyusunan Rencana Kontijensi                                               | Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal                                                     | 1<br>Dokumen | 191,799,980          | Pendapatan Daerah        |
| 32           | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                        | Jumlah warga negara yang ikut pelatihan                                                                            | 250 org      | 32,379,970           | Pendapatan Daerah        |
| XI           | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                   | <b>Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender</b> | <b>100%</b>  | <b>908,272,910</b>   | <b>Pendapatan Daerah</b> |
| 33           | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana                                 | 100%         | 665,091,800          | Pendapatan Daerah        |
| 34           | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana                        | 100%         | 69,477,500           | Pendapatan Daerah        |
| 35           | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase korban bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya                                          | 100%         | 85,422,750           | Pendapatan Daerah        |
| 36           | Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana                          | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana                                              | 100%         | 29,254,820           | Pendapatan Daerah        |
| 37           | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit                        | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana non alam epidemi/wabah penyakit       | 100%         | 59,026,040           | Pendapatan Daerah        |
| XII          | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                         | <b>Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan</b>                                          | <b>100%</b>  | <b>19,990,089</b>    | <b>Pendapatan Daerah</b> |
| 38           | Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota                   | Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun                                                 | 3<br>Dokumen | 19,990,089           | Pendapatan Daerah        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                             |                                                                                                                    |              | <b>4,594,450,041</b> |                          |

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2022, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan OPD yang membidangi fungsi lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Malili, 21 Juli 2022

**KEPALA PELAKSANA,**  
  
**Drs. MUH. ZABUR**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660930 198603 1 004